

## **DIPLOMASI DAN POWER: SEBUAH KAJIAN ANALISIS**

**Rendi Prayuda<sup>1</sup>, Rio Sundari<sup>2</sup>**

**International Relations Department Universitas Islam Riau, [rendiprayuda@soc.uir.ac.id](mailto:rendiprayuda@soc.uir.ac.id)<sup>1</sup>  
International Relations Department Universitas Islam Riau, [riosundari@soc.uir.ac.id](mailto:riosundari@soc.uir.ac.id)<sup>2</sup>**

### **ABSTRACT**

After the 1961 of Wina convention, diplomacy became one of the containers for the actualization of relations between countries in the international political arena to convey the national interests of a country to other countries. The national interest of a country is certainly a diplomatic mission for the state in the scope of international practice. The practice of a country's diplomacy success is of course influenced by various factors and the power factor is one of the determining factors for a country's diplomatic success. This paper use a descriptive qualitative approach with the collect data by library research. The results of this study indicate that the effectiveness of a country's diplomacy depends on the extent of its own national strength. Some things that determine the success of diplomacy can be analyzed from the diplomatic environment in the form of the international system, the diplomatic environment and domestic relations. While the concept of power is determined by elements that do not change (natural resources, geography, demographics and population) as well as elements that are easily changed (character and morality of the nation, the quality of government and diplomatic quality).

**Keywords: *Diplomacy, State and Power.***

## A. Latar Belakang

Hubungan internasional adalah sebuah kajian ilmu politik yang menganalisis mengenai tindakan dan kebijakan dari aktor negara dan non negara (individu, kelompok, organisasi dan perusahaan multinasional) dalam arena lingkungan internasional untuk menyampaikan kepentingannya masing-masing. Dinamika hubungan internasional mengalami berbagai perdebatan teoritik dan paradigma mulai dari perdebatan paradigma idealisme dan realisme, paradigma realisme dan behavioralisme serta perkembangan paradigma alternatif seperti pluralism, konstruktivisme dan *critical theory*.

Kajian hubungan internasional memiliki berbagai pendekatan dalam menganalisis dinamika isu dalam arena politik internasional. Salah satu pendekatan legendaris dalam ilmu hubungan internasional yang mengalami dinamika signifikan pasca perang dingin adalah pendekatan realisme klasik dan neorealisme. Pendekatan Realis memiliki tema *Struggle for power and security*. Hubungan internasional ditandai dengan anarki, segala cara dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Morgenthau menyatakan bahwa *super power* adalah fokus utama hubungan internasional, *power* adalah alat untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*). Perspektif Realis memiliki tiga asumsi dasar dalam menganalisis hubungan antar negara dalam politik internasional, yaitu:

1. Negara merupakan aktor utama dan tunggal, bahwa dalam hal ini

hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat, dengan demikian faktor keamanan dilihat dalam konteks kepentingan nasional.

2. Pendekatan realisme fokus pada pendekatan politik dan keamanan yaitu dengan cara menilai fungsi kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri.
3. Pendekatan realisme menjelaskan adanya hirarki yang jelas dari pokok - pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional.

Asumsi dasar pemikiran realis adalah pandangan pesimis dan keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan akhirnya diselesaikan melalui perang. Suatu tindakan politik akan dinilai sebagai tindakan rasional apabila dapat mendekatkan pelaku politik pada tujuannya. Sikap yang terbaik adalah sikap yang pragmatis, kompromis dan saling menerima (John Baylis. 2001; Hlm 172-176). Untuk memperjuangkan kepentingannya, maka setiap negara akan memaksimalkan segala potensi yang ada dengan pengembangan kekuatan nasionalnya untuk mendapatkan dan mencapai kepentingan nasionalnya.

Perspektif realisme menjelaskan negara adalah aktor tunggal dan rasional dalam politik internasional. Pendekatan realisme memiliki anggapan dasar bahwa eksistensi negara bangsa dianalisis dari perilaku Negara bangsa tersebut, dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, dimanapun berada, pada dasarnya

berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Jadi, untuk menganalisis manuver diplomatik dan tindakan-tindakan diplomatik lain dilihat sebagai akibat dari tekanan-tekanan politik, ideologi, opini publik atau kebutuhan ekonomi dan sosial dalam negeri (Mochtar Masóed; 1990. Hlm 45). Oleh karena itu, kondisi dalam negeri sebuah negara akan menentukan kebijakan luar negeri yang akan dicapai melalui jalur diplomasi secara damai tersebut.

Sistem internasional yang anarki merupakan bentuk kehidupan yang *self help system* dimana negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Hubungan diantara aktor yang independent selalu memiliki kemungkinan konflik mengenai masalah politik, ekonomi dan sosial, dan kadangkala konflik tersebut akan mengakibatkan penggunaan *force*. Strategi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari yang menyertai kehidupan politik negara didalam anarki internasional. Struktur anarki terbukti sangat bertahan lama, dan selama struktur tetap seperti itu, strategi akan terus berlangsung dalam hubungan internasional. Strategi dalam pengertian yang luas dapat didefinisikan sebagai "*the art or science of shaping means so as to promote ends in any field of conflict*". Dalam kajian Strategi, *the means to be shaped* adalah militer, *the field of conflict* adalah sistem internasional, dan *ends* adalah tujuan politik aktor yang cukup luas dan menunjukkan adanya konteks internasional yang cukup signifikan.

Strategi dalam pengertian yang lebih spesifik adalah "*the art of distributing and applying military means to fulfil end of policy*" (Liddel Hart, 1968, p.335), "*exploiting military force so as to attain given objects of policy*" (Bull, 1968, p.593), "*the relationship between military power and political purpose*" (Gray, 1982b, p. 1), dan "*the art of the dialectic of two opposing wills using force to resolve their dispute*" (Beaufre, 1965, p. 22).Halle juga menawarkan definisi :"*the branch of political studies concerned with the political implications of the war-making capacity available to nations*" Dari definisi diatas, jelas bahwa esensi strategi adalah mengenai "*force*" atau "*the threat of force*" (Gray,1982a,p. 3).

Strategi pada hakekatnya adalah usaha untuk memenangkan suatu peperangan. Liddle Hart merumuskan strategi sebagai cara mendistribusikan dan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik. Unsur-unsur analitikal dalam rumusan Liddle Hart adalah distribusi, penggunaan kekuatan militer, dan tujuan. Edward M. Earle dan Robert E.Osgood memasukkan unsur-unsur non-militer dalam kalkulasi strategis, dan mengawali penggunaan strategi untuk maksud-maksud damai dan perang. Di samping itu, Henry Kissinger mendefinisikan strategi sebagai "cara yang ditempuh oleh suatu masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya". Kelangsungan hidup suatu bangsa-negara dapat dinilai sebagai tujuan yang lebih sempit dibanding tujuan-tujuan yang pada mulanya hendak dicapai melalui peperangan dalam

pengetian strategi yang lebih awal. Oleh karena itu aktualisasi dari strategi yang dilakukan oleh pemimpin sebuah negara akan dilakukan oleh diplomat negara tersebut dalam arena perundingan diplomatik untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Level analisa berasal dari anggapan bahwa perilaku setiap negara sebenarnya bergantung pada perilaku negara lainnya dalam sebuah sistem internasional. Untuk menerangkan sistem yang abstrak ini bisa dipakai analogi yang lebih sederhana yaitu sistem sirkulasi tubuh manusia, yang terdiri dari nadi, arteri, organ dan sel - sel yang secara keseluruhan harus bekerja dan berfungsi secara baik untuk kelancaran dalam sistem dan akhirnya menghasilkan tubuh yang sehat dan performa yang baik. Demikian juga dunia internasional, ia juga memiliki sub sistem yang saling berkaitan satu sama lain (KJ. Holsti. 1992: Hlm 23). Setiap negara di dalam sistem politik internasional bertanggung jawab terhadap keamanan dan kemerdekaannya sendiri (*Struggle for power*), kedudukan negara lain dianggap sebagai ancaman yang dapat membahayakan kepentingannya yang mendasar. Maka secara umum, negara - negara merasa tidak aman sehingga timbul rasa ketakutan dan ketidakpercayaan satu sama lain. Mereka menjadi sangat fokus dengan kekuatannya masing - masing dengan maksud untuk mencegah terjadinya penyerangan oleh negara lain.

### **B. Metode Penelitian**

Analisis terhadap korelasi antara diplomasi dan power dalam kajian ilmu

hubungan internasional ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah sebuah kajian penelitian yang menjelaskan fenomena masalah penelitian secara deskriptif sesuai dengan realitas fenomena secara empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yang menjadikan buku, jurnal bereputasi, website dan artikel ilmiah lainnya sebagai bahan bacaan dan analisis teoritis.

### **C. Hasil dan Diskusi**

Kajian tentang diplomasi berkembang pesat pasca konvensi Wina tahun 1961 yang menjelaskan bahwa tujuan-tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum tidaklah untuk keuntungan individu akan tetapi untuk menjamin pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi-misi diplomatik dalam mewakili Negara-Negara. Menegaskan bahwa aturan hukum kebiasaan internasional tetap terus mengatur masalah-masalah yang tidak secara tegas diatur oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Berdasarkan konvensi Wina tahun 1961, maka Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala misinya atau seseorang anggota staf diplomatiknya adalah *persona non grata* atau bahwa anggota lainnya dari staf misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, Negara pengirim, sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan *non*

*grata* atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial Negara penerima. Gedung misi tidak dapat diganggu gugat (*inviolabel*). Pejabat-pejabat dari Negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi. Negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya. (<https://sites.google.com/site/publishedbysumadi/vienna1961>).

Menurut Sir Earnest Satow dalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice* mengatakan bahwa diplomasi merupakan penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dengan negara-negara berdaulat (Sir Earnest Satow. 1995. Hlm 2). Selain itu pandangan ahli mengenai diplomasi, yaitu:

"Diplomasi pada dasarnya adalah usaha untuk meyakinkan pihak lain atau negara lain untuk dapat memahami dan membenarkan pandangan kita dan jika mungkin mendukung andangan kita itu, tanpa perlu menggunakan kekerasan" (Hasyim Djalal: 1990. Hlm 30).

Menurut KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul *The Principle of Diplomacy*, maka diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional merupakan seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (SL. Roy.

2001. Hlm 21), yang dalam hal ini merupakan kepentingan nasional suatu negara dalam dunia internasional, namun oleh sebagian pandangan diplomasi lebih menekankan terhadap negosiasi-negosiasi perjanjian atau sebagai posisi tawar-menawar dengan negara lain. Diplomasi sangat erat dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dilakukan dengan cara-cara damai, tetapi apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya (RW, Sterling: 233). Sehingga dapat dikatakan bahwa perang juga merupakan salah satu sarana dalam diplomasi di dunia internasional. S.L. Roy, mengkaji hal-hal penting yang terdapat dalam berbagai definisi mengenai diplomasi. Menurutnya dari definisi-definisi tersebut beberapa hal tampak jelas, bahwa:

1. Unsur pokok diplomasi adalah negoisasi,
2. Negoisasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara,
3. Tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga serta memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin dan dilaksanakan secara damai, pemeliharaan perdamaian dengan tanpa merusak kepentingan nasional merupakan tujuan utama diplomasi,
4. Teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk mempersiapkan perang bukan untuk menghasilkan perdamaian,

5. Diplomasi berhubungan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara,
6. Diplomasi modern berhubungan erat dengan sistem negara,
7. Diplomasi tidak bisa dipisahkan dari perwakilan negara (SL. Roy. 1995. Hlm 4).

Tujuan diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas territorial. Menurut Kautilya tujuan utama diplomasi adalah menjamin keuntungan maksimum Negara sendiri, dan kepentingan terdapat tampaknya adalah pemeliharaan keamanan. Fungsi utama dari pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi dan ruang lingkup diplomasi adalah menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan Negara melalui negosiasi yang sukses, apabila negosiasi gagal perang merupakan bagian dari sarana diplomasi. Selain itu terdapat tiga cara dasar dalam pelaksanaan diplomasi suatu negara yaitu kerjasama, persuasi dan pertentangan. Sehingga dalam proses diplomasi suatu Negara pasti akan menjalankan tiga pelaksanaan diplomasi tersebut.

Fungsi utama dari pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi dan ruang lingkup diplomasi adalah menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan negara melalui negosiasi yang sukses, apabila negosiasi gagal perang merupakan bagian dari sarana diplomasi. Selain itu terdapat tiga cara dasar dalam pelaksanaan diplomasi suatu negara yaitu kerjasama, persuasi dan pertentangan (SL. Roy. 1995. Hlm 4).

Sehingga dalam proses diplomasi suatu Negara pasti akan menjalankan tiga pelaksanaan diplomasi tersebut.

Suatu negara yang berusaha melaksanakan politik luar negeri yang cerdas dan secara damai tidak dapat berhenti membandingkan tujuan-tujuannya sendiri dengan tujuan-tujuan negara lain berdasarkan kesesuaian tujuannya (Yusuf Sufri. 1989. Hlm 119). Jika tujuan-tujuan mereka tidak cocok, maka negara A akan menetapkan bahwa tujuan-tujuannya adalah penting bagi negaranya sendiri hingga tujuan-tujuan tersebut harus dicapai meskipun tidak sesuai dengan tujuan negara B. Sebaliknya, jika negara A mendapati bahwa tujuan-tujuannya penting sekali untuk kepentingan nasionalnya maka negara A kemudian akan melihat terlebih dahulu tujuan negara B yang tidak sesuai dengan tujuannya itu setelah itu baru dilakukan kesesuaian tujuan diantara keduanya.

Kesimpulannya melalui tawar-menawar diplomatik, yaitu dengan kompromi memberi dan menerima, harus dicari jalan agar kepentingan-kepentingan negara A dan B dapat saling dipertemukan. Cara-cara yang dipergunakan dalam praktek diplomasi ada tiga, yaitu: persuasif, kompromi dan ancaman kekuatan senjata (Yusuf Sufri. 1989. Hlm 119). Dalam kasus ini awalnya diplomasi Indonesia terhadap kebijakan Malaysia adalah dengan menggunakan mahkamah internasional, namun pasca lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan, maka diplomasi Indonesia terhadap Malaysia adalah dengan meningkatkan kekuatan

powernya sebagai elemen diplomasi untuk mempertahankan wilayah teritorialnya. Diplomasi terbagi dua, yaitu:

1. *Soft Diplomacy*: diplomasi dalam bentuk penyelesaian secara damai dalam bidang kebudayaan, bahasa, persahabatan dan ekonomi
2. *Hard Diplomacy*: diplomasi dalam bentuk perang, yaitu agresi militer dan politik (Andri Hadi. 2009)

Oleh karena itu, jika kita mengambil studi kasus mengenai diplomasi sebuah negara terhadap negara lain, maka diplomasi yang dilakukan oleh negara dilakukan dengan menggunakan *soft diplomacy* dan *hard diplomacy*. Cara *soft diplomacy* dengan mengikuti perundingan bilateral dengan negara lain serta menyerahkan penyelesaian permasalahan konflik kepada pihak ketiga yaitu Mahkamah Internasional. Selain itu, juga menggunakan *hard diplomacy* dengan cara meningkatkan kekuatan militer negara tersebut dan melakukan kerja sama pertahanan dengan negara lain untuk meningkatkan efek penangkalan (*deterrence*) ketika terjadi konflik. Menurut John T. Rourke, hakikat dan peranan diplomasi dipengaruhi oleh *setting* (lingkungan) yang disebut dengan *diplomacy setting* (Rourke, John T. 2002, hlm 26) *Setting* disini dimaksudkan sebagai kondisi yang memiliki peranan penting dalam menciptakan *output diplomacy*. Lingkungan diplomasi terbagi dalam tiga bagian yaitu:

#### 1. Sistem Internasional

Menurut kaum realis hakekat dari sistem internasional yang anarki telah menciptakan sebuah *setting*

dimana para aktor yang memiliki kepentingan sendiri dalam tujuan diplomatik menggunakan *power* yang dimilikinya untuk mencapai kepentingan mereka diatas kepentingan pihak lain. Hal yang perlu ditekankan kembali bahwa sistem internasional tidak mempunyai badan otoritatif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga setiap negara harus berjuang sendiri dengan menggunakan *power* yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan di dunia internasional.

#### 2. Lingkungan Diplomatik

Bagian ini mencakup hubungan diantara beberapa aktor yang terlibat dalam bagian permasalahan yang dihadapi. Bagian ini dikategorikan dalam empat bagian, yaitu:

##### a. Diplomasi perseteruan

Diplomasi perseteruan berlangsung dalam lingkaran yang mengalami permusuhan dimana satu atau beberapa negara terikat pada perseteruan senjata atau ketika terdapat suatu kemungkinan yang mendasari bahwa pertempuran merupakan kondisi yang harus dihadapi.

##### b. Diplomasi Perlawanan

Lingkungan dari diplomasi perlawanan terjadi pada saat

adanya konfrontasi diantara dua negara atau lebih yang berbenturan kepentingan tetapi pada saat itu tidak terjadi konflik bersenjata. Diplomasi ini melibatkan isu-isu internasional, seperti suatu negara melakukan penekanan terhadap negara lain untuk memperoleh apa yang mereka inginkan.

- c. Diplomasi Gabungan (koalisi)  
Diplomasi gabungan terjadi ketika sejumlah negara memiliki kepentingan yang sama dalam aktivitas internasional.
- d. Diplomasi Perantara  
Diplomasi perantara berbeda dengan tiga jenis diplomasi diatas, dimana kegunaan diplomasi ini berpengaruh saat negara yang tidak terlibat secara langsung sebagaimana salah satu dari beberapa pihak berusaha membantu dua atau lebih sisi dalam menyelesaikan konflik perbedaan yang ada diantara mereka.

### 3. Hubungan Domestik

Bagian ketiga dalam lingkungan diplomasi adalah politik domestik. Politik domestik ini dapat digambarkan melalui teori *Two level Game* dimana para diplomat harus berjuang mencapai solusi antara persaingan di level internasional dengan level domestik (legislator, opini publik dan kelompok kepentingan). Pada bagian ini para diplomat akan berusaha

memaksimalkan keputusan yang akan mendapat dukungan dari konstituen dan level domestik.

Berdasarkan teori di atas, pengambilan langkah diplomasi oleh sebuah negara dalam menghadapi kebijakan negara lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan internasional dan lingkungan diplomatik. Lingkungan internasional menuntut setiap negara untuk berusaha memperjuangkan kepentingannya secara sendiri-sendiri, sehingga berdasarkan hal tersebut maka masuk akal jika sebuah negara akan merubah pola diplomasinya terhadap negara lain atau lingkungan eksternal guna mengamankan wilayah teritorialnya dari ancaman negara lain. Faktor lingkungan diplomatik juga sangat mempengaruhi diplomasi negara, hal ini bisa dilihat dengan adanya benturan kepentingan, sehingga memunculkan diplomasi perlawanan diantara kedua negara.

Keefektifan diplomasi suatu negara bergantung pada sejauh mana kekuatannya nasionalnya sendiri. Dalam menerapkan diplomasinya, suatu negara harus mempertimbangkan kekuatan dan sumber dayanya yang ada. Kekuatan (*power*) dan sumber daya tetap merupakan sumber penting dalam menentukan keberhasilan diplomasi, karena faktor ini terakumulasi dalam kapabilitas suatu negara terhadap negara lain dalam diplomasi (M, Saeri. 2003. Hlm 137-138). Sehingga suatu negara dikatakan berhasil melakukan proses diplomasi jika negara tersebut mampu menggunakan kekuatan *powernya* dengan



baik. Hans J Morgenthau mengatakan bahwa *power* didefinisikan sebagai hubungan antara dua aktor politik dimana aktor A memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dan tindakan aktor B dan begitu juga sebaliknya. Terdapat beberapa faktor yang memberikan kekuatan suatu negara terhadap negara-negara lain, dan hal ini disebut dengan unsur-unsur kekuatan nasional yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Unsur yang tidak mudah berubah
  - a. Geografi (letak, luas dan kondisi wilayah)
  - b. Sumber daya alam (*National Resource*)  
Faktor yang relatif stabil mempunyai pengaruh penting atas kekuatan suatu negara sehubungan dengan negara lain. Seperti pangan dan bahan mentah.
  - c. Kemampuan industri  
Kapasitas industri tergantung kepada:
    - a. Kualitas dan kapasitas produksi dan peralatan-peralatan industri
    - b. Pengetahuan teknis para buruh
    - c. Keterampilan para insinyur
    - d. Kecemerlangan pemikiran inventif para sarjana
    - e. Tingkat organisasi manajemen

Dengan demikian, besarnya industri nasional dan kapasitas teknologi

yang dimilikinya maka akan menentukan hirarki dari *power* yang dimiliki oleh negara-negara itu sendiri.

d. Kesiagaan militer

Kesiagaan militer memberi makna aktual terhadap faktor-faktor geografis, sumber-sumber alam dan kemampuan industri. Kesiagaan militer memerlukan alat kelengkapan militer yang mampu mendukung kebijaksanaan luar negeri, hal ini tergantung dari teknologi, kepemimpinan, kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata suatu negara.

e. Jumlah dan kualitas penduduk

- a. Penyebaran
- b. Kecenderungan perkembangan penduduk

2. Unsur yang mudah berubah

1. Karakter nasional, watak dan sikap bangsa

Eksistensinya, menyangkut pada aspek kualitas faktor manusia, keutamaan akal yang berbeda-beda pada setiap bangsa.

2. Moral nasional/akhlak dan semangat nasional

Semangat nasional adalah tingkat ketahanan dengan suatu bangsa dalam mendukung politik luar negeri pemerintahannya

pada masa damai dan perang. Meliputi seluruh aktivitas nasional, terutama pendapat umum. Kualitas faktor ini tampak pada saat suatu Negara berada dalam kondisi krisis.

### 3. Kualitas diplomasi

Penanganan masalah-masalah politik luar negeri suatu negara oleh diplomat-diplomatnya pada masa damai, sama nilainya terhadap *power* dan penanganan pimpinan militer atas strategi dan teknik pada masa perang. Dapat dikatakan bahwa bila moral nasional adalah jiwa, maka diplomasi adalah otak dari kekuatan nasional.

### 4. Kualitas Pemerintahan

Pemerintahan yang baik ditinjau sebagai suatu pesyaratan yang independen atas kekuatan nasional, meliputi:

- a. Keseimbangan antara sumber material dan sumber daya manusia yang membuat kekuatan nasional pada satu pihak dan politik luar negeri yang dijalankan pada lain pihak.
- b. Keseimbangan antar sumber-sumber tersebut
- c. Dukungan rakyat pada politik luar negeri yang ditempuh.

Implementasi diplomasi sebuah negara tentu saja dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara tersebut. Donald E. Nuchterlain mengemukakan

kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu Negara dalam hubungannya dengan Negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya (Donald E. Nuchterlain. 1979, hlm 57). Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

1. *Defense Interest*: Kepentingan untuk melindungi Negara atau rakyat dari ancaman fisik dari Negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem suatu Negara.
2. *Economic Interest*: Kepentingan ekonomi yang berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan Negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan Negara lain akan memberikan keuntungan.
3. *World Order Interest*: Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu Negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas Negara dengan aman.
4. *Ideological Interest*: Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat

dari suatu Negara yang berdaulat (Donald E. Nuchterlain. 1979, hlm 57).

Berikut ini adalah matrix strategi yang disusun oleh Donald E. Nuchterlain mengenai kepentingan nasional negara Indonesia dalam melakukan hubungan dan mengedepankan kepentingan nasionalnya dengan Malaysia khususnya dalam permasalahan penjagaan wilayah perbatasan, yaitu sebagai berikut:

**National Interest Matrix**

Basic Interest of State	Intensity of Interest			
	Survival	Vital	Major	Peripheral
Defense of Homeland				
Economic of Wellbeing				
Favorable World Order				
Promotion of Values				

Sumber: Donald E. Nuchterlain. National Interest A new Approach, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979.

Berdasarkan matrix yang digambarkan oleh Nuchterlain tersebut, bahwa semakin garis diagonal mengarah ke kepentingan keamanan terhadap wilayah teritorial dan permasalahan *survival* atau eksistensi teritorial sebuah negara maka akan semakin menjadi permasalahan yang penting bagi sebuah negara. Sebuah negara harus melakukan beberapa alternatif dalam menghadapi ancaman teritorial terhadap wilayah teritorial negaranya.

Aktualisasi dari kepentingan nasional sebuah negara tentu saja

berpengaruh dalam arena diplomasi negara untuk membentuk opini publik dari negara tersebut. Pembentukan opini publik sebagai bentuk manifestasi kebijakan politik luar negeri sebuah negara dapat dikategorikan sebagai sebuah *soft power* yang berjalan beriringan dengan *hard power*. *Hard power* dapat diartikan sebagai kekuatan persenjataan atau kekuatan diplomasi bersenjata dari suatu negara ditataran internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan *soft power* berarti kekuatan negara dalam membentuk sebuah paradigma yang akan mendukung terlaksananya sebuah kebijakan luar negeri. Secara umum *power* termasuk dalam tindakan kebijakan luar negeri sebuah Negara yang memiliki tiga unsur utama, yaitu:

1. Daya paksa (*Force*)

Didefenisikan sebagai ancaman eksplisit atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi atau sarana pemaksa lainnya oleh aktor A terhadap aktor B demi mencapai tujuan politik A.

2. Pengaruh (*Influence*)

Sebagai penggunaan alat-alat persuasi tanpa paksaan oleh aktor A demi menjamin agar perilaku aktor B sesuai dengan keinginan aktor A.

3. Wewenang (*Authority*)

Sikap tunduk sukarela aktor B pada arahan (nasehat, perintah) yang diberikan oleh aktor A, misalnya penghormatan, solidaritas, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan, pengetahuan

dan keahlian (KJ. Holsti. 1992: Hlm 23).

Menurut K.J Holsti, *power* adalah kesatuan yang utuh dari seluruh hubungan politik, ditujukan pada suatu proses bagaimana suatu negara mempengaruhi perilaku Negara lain untuk bertindak sesuai yang dikehendakinya. Dimana pengaruh melalui berbagai tindakan atau isyarat, berusaha mengubah atau mempertahankan perilaku Negara lain (misalnya tindakan, kesan dan kebijaksanaannya) (KJ. Holsti. 1992: Hlm 201).

Untuk mengetahui beberapa penggunaan pengaruh *power* suatu negara yang berkontribusi terhadap diplomasi suatu negara, maka akan dijelaskan melalui beberapa variabel berikut ini, yaitu:

#### 1. Kapabilitas

Kapabilitas dimobilisasi dalam mendukung tindakan untuk mempengaruhi perilaku Negara lain. Seperti uang, kekayaan. Informasi, waktu, politik dan kekuasaan dan kapabilitas merupakan kesanggupan untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Indonesia menggunakan kemampuan politik dan militernya dengan meningkatkan kekuatan persenjataannya.

#### 2. Kebutuhan

Kebutuhan menentukan keberhasilan dan kegagalan antara dua negara dalam hubungan diplomasinya.

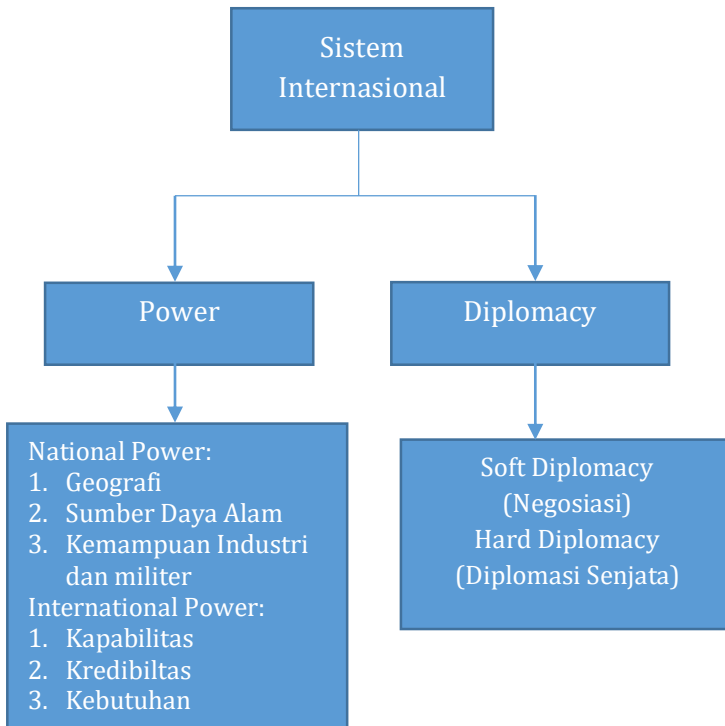
Secara umum Negara yang membutuhkan sesuatu dari Negara lain tidak berdaya terhadap tindakan pengaruhnya. Kondisi ini merupakan alasan utama bahwa Negara-negara lemah dalam segala kapabilitasnya mampu memperoleh konsesi dari Negara kuat. Ketergantungan menyebabkan terjadinya ketidakberdayaan suatu negara terhadap tuntutan dan tindakan pengaruh Negara lain.

#### 3. Kredibilitas

Pandangan pemerintah lawan terhadap suatu negara dan kepentingan Negara yang menuntutnya. Indonesia sebagai sebuah negara memiliki kapabilitas secara kekuatan *power* untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Sehingga hal ini membuat Indonesia harus merubah pola diplomasinya terhadap Malaysia guna menjaga keutuhan wilayahnya (KJ. Holsti. 1992: Hlm 209).

Dari pemaparan teori diplomasi dan *power* diatas, maka dapat digambarkan hubungan keduanya sebagai berikut:

### Gambar Model Pengambilan Langkah Diplomasi



#### D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keefektifan diplomasi sebuah negara dipengaruhi oleh berbagai faktor dan salah satu faktor kuncinya adalah kekuatan nasional sebuah negara. Diplomasi merupakan penyampaian kepentingan nasional secara damai yang dilakukan dalam arena sistem internasional, lingkungan diplomatik dan hubungan politik domestik. Sedangkan variabel kekuatan nasional (power) sebuah negara bergantung pada unsur yang tidak mudah berubah (geografi, demografi dan sumber daya alam), sedangkan unsur yang mudah berubah adalah (karakter/moralitas nasional,

kualitas pemerintahan dan kualitas diplomat).

#### E. Daftar Pustaka

- John Baylis and teven Smith, 2001. *The Globalization of World Politics*, the 3th edition: an introduction to international Relations. New York: Oxford University Press.
- Mohtar Mas'oeed, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. LP3ES, Yogyakarta.
- K.J Holsti. 1992. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. Binacipta. Bandung
- S.L Roy. 1995. *Diplomasi*. Edisi Kedua. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

- Hasyim Djalal, 1990. *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa*. CSIS, Jakarta.
- Panikkar KM. 2001. *The Principle and Practice of Diplomacy*.
- Morgenthau Hans. 1973. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. Edisi kelima. Knopf. New York.
- Sufri Yusuf, 1989. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Andri Hadi SH.LLM. 2009. Bahan seminar “*Politik Luar Negeri Indonesia: Prospek dan tantangan dalam Era Globalisasi*”. Dirjen IDP Departemen Luar Negeri RI.
- Rourke, John T. 2002. *International Politics and World Stage*, New York: United Nations.
- Drs. M, Saeri M.Hum, *Diplomasi dalam Perspektif Politik*. Jurnal Antar Bangsa. Universitas Riau. Pekanbaru. Vol 1 No 2, Juli 2003.
- Donald E. Nucterlain. 1979. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979.
- Bantarto Bandoro. 1992. *Masalah keamanan internasional, Model center periphery*. Jakarta. CSIS.
- Coloumbis Theodore & James E Wolfe. 1990. *Pengantar Hubungan Internasional: Keadilan dan power*, Bandung: Putra Abardin.
- Plano C. Jack. *Kamus Hubungan internasional*. Jakarta: Putra Abardin.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan VIII*. Jakarta: Balai pustaka
- Yusuf Sufri. 1989. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- <https://sites.google.com/site/publishedbysumadi/vienna1961>